

CASCADING KINERJA RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE											
TAHUN 2024-2026											
TUJUAN RPD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan										
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Reformasi Birokrasi										
SASARAN RPD KAB. BONE 2024-2026	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Keuangan Perangkat Daerah				Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah						
INDIKATOR SASARAN RPD	Indeks Pengelolaan Kuangan Daerah				Nilai SAKIP Kabupaten						
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah						
INDIKATOR TUJUAN	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah				Nilai SAKIP Kabupaten						
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Daerah Yang bersumber Dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah				Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah						
INDIKATOR SASARAN	Persentase Pertumbuhan PAD				Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP						
PENANGUNG JAWAB	KEPALA BADAN										
PROGRAM 1	Pengelolaan Pendapatan Daerah				Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota						
PROGRAM 2	Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota										
SASARAN PROGRAM 1 & 2	Meningkatnya Proyeksi Pendapatan Daerah	Meningkatnya Realisasi Penetapan Target WP & WR Yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Realisasi Pembayaran WP dan WR	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pajak Daerah	Tercapainya target kinerja Program Teknis Perangkat Daerah						
INDIKATOR PROGRAM 1	Persentase Peningkatan Proyeksi Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penetapan Target WP & WR Yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran WP dan WR	Persentase Peningkatan Layanan Digitalisasi Pajak Daerah	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%) "						
INDIKATOR PROGRAM 2	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)"										
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	Bid. Perencanaan & Pengembangan PD	Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bid. Pengendalian & Evaluasi Pajak Daerah	Bid. Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Sekretariat						
KEGIATAN 1	Pengelolaan Pendapatan Daerah				Perencanaan, Penguanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan
KEGIATAN 2	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah										

SASARAN KEGIATAN 1 & 2	Tersedianya Dokumen Proyeksi Pendapatan Daerah	Tersedianya Dokumen Peningkatan target WP dan WR yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	Tersedianya Dokumen Realisasi Pembayaran WP & WR	Terselenggaranya Layanan Digitalisasi pajak daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang wajib disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan pada perangkat daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya jasa Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah
INDIKATOR KEGIATAN 1	<u>Hasil</u> : Persentase Proyeksi Pendapatan Daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Dokumen Proyeksi Pendapatan Daerah	<u>Hasil</u> : Peningkatan target WP & WR yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Dokumen Peningkatan Target WP &WR yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	<u>Hasil</u> : Realisasi pembayaran WP & WR <u>Keluaran</u> : Jumlah Dokumen Realisasi Pembayaran WP dan WR	<u>Hasil</u> : Terlaksananya layanan digitalisasi pajak daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Dokumen pelaksanaan digitalisasi pajak daerah	<u>Hasil</u> : Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	<u>Hasil</u> : Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang tersusun	<u>Hasil</u> : Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang tersusun	<u>Hasil</u> : Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah yang tersusun	<u>Hasil</u> : Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan berdasarkan Rencana Kebutuhan Perangkat Daerah	<u>Hasil</u> : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Jenis Jasa Penunjang penyelenggaraan urusan yang tersedia sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.	<u>Hasil</u> : Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan pada Perangkat Daerah
INDIKATOR KEGIATAN 2	<u>Hasil</u> : Pesentase ketersediaan dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah <u>Keluaran</u> : Jumlah Dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah										
UNIT KERJA PENGANGGUNG G JAWAB KEGIATAN 1	Bid. Perencanaan & Pengembangan PD	Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bid. Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah	Bid. Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kasubag Program	Kasubag. Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
Sub Kegiatan	Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Penetapan wajib pajak daerah	Penagihan pajak daerah	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sasaran Sub Keg	tersusunnya dokumen Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	tersusunnya dokumen Penetapan wajib pajak daerah	terlaksananya Penagihan pajak daerah	terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Sub Keg	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Derah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakuan penelitian & Verifikasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya



Indikator Sub Keg	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
		Penetapan wajib retribusi daerah										
		Tersusunnya laporan Penetapan wajib retribusi daerah										
		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
							Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Bid. Perencanaan & Pengembangan PD	Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bid. Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah	Bid. Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kasubag Program	Kasubag. Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian					
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BAPENDA	Pelayanan Administrasi Keuangan BAPENDA	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Diklat dan Bimtek Bagi ASN BAPENDA	Pelayanan Administrasi Umum BAPENDA	Barang Milik Daerah (BMD) pada BAPENDA	Jasa Pelayanan Umum BAPENDA	Barang Milik Daerah (BMD) pada BAPENDA	

STAKEHOLDE R TERKAIT	1. Bupati dan Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah 3. Inspektorat Daerah 4. Bappeda Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. BKAD Kab. Bone 7. BAPENDA Prov Sul-Sel 8. BPK RI 9. BPKP 10. Kementerian terkait 11. Camat 12. Kepala Desa 13. Masyarakat 14. OPD Pemungut Retribusi	1. Bupati dan Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah 3. Inspektorat Daerah 4. Bappeda Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. BKAD Kab. Bone 7. BAPENDA Prov Sul-Sel 8. BPK RI 9. BPKP 10. Kementerian terkait 11. Camat 12. Kepala Desa 13. Masyarakat 14. OPD Pemungut Retribusi	1. Bupati dan Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah 3. Inspektorat Daerah 4. Bappeda Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. BKAD Kab. Bone 7. BAPENDA Prov Sul-Sel 8. BPK RI 9. BPKP 10. Kementerian terkait 11. Camat 12. Kepala Desa 13. Masyarakat 14. OPD Pemungut Retribusi	1. Bupati dan Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah 3. Inspektorat Daerah 4. Bappeda Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. BKAD Kab. Bone 7. BAPENDA Prov Sul-Sel 8. BPK RI 9. BPKP 10. Kementerian terkait	1. Bupati dan Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah 3. Inspektorat Daerah 4. Bappeda Kab. Bone 5. BKAD Kab. Bone 6. BPK RI 7. BPKP		1. Bupati dan Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah 3. BKPSDM Kab. Bone 4. BAPENDA Prov SulSel 5. Lembaga diklat Resmi bagi ASN		1. Bupati dan Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah 3. BKAD Kab. Bone 4. ULP Kab. Bone 5. Inspektorat Daerah Kab. Bone 6. BPK RI 7. Penyelia Barang dan Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah 3. BKAD Kab. Bone 4. ULP Kab. Bone 5. Inspektorat Daerah Kab. Bone 6. BPK RI 3. BPK RI	1. Bupati dan Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah 3. BKAD Kab. Bone 4. ULP Kab. Bone 5. Inspektorat Daerah Kab. Bone 6. BPK RI 7. Penyelia Barang dan Jasa
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---	---

Watampone, 03 Februari 2023



**KABUPATEN BONE**  
**KAB. BONE**  
**KEPALA BAPENDA KAB. BONE**  
  
**S. MUHAMMAD AKBAR, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660717 198603 1 009